

BAB I

PENDAHULUAN

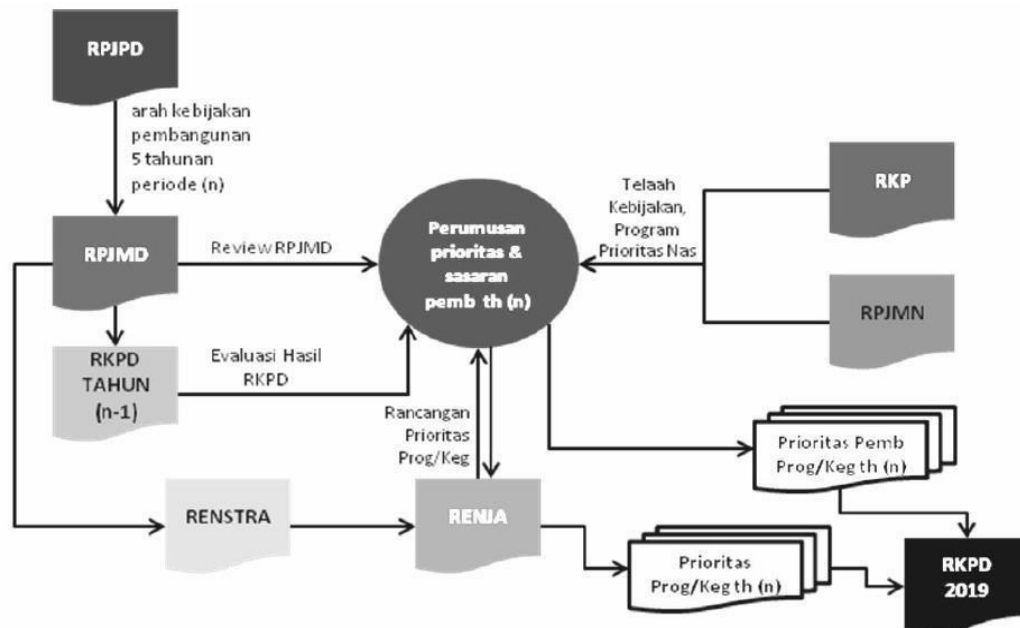
1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta keselarasan ruang lingkup dengan Prioritas Nasional yang telah diterbitkannya dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Proses penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD utamanya pada target indikator kinerja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan dinamika Peraturan Perundangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diperkuat dengan validasi pemutakiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020) yang mempengaruhi substansi RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja perangkat daerah juga harus selaras dengan program kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMN maupun kebijakan daerah yang tercantum dalam RKPD berpedoman pada RPJMD. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar.



Kondisi lingkungan strategis khususnya dampak pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, startegi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sejalan dengan Visi Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara dan Misi yaitu untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, tugas pokok dan fungsi BPSDMD dalam pengembangan kompetensi aparatur terkait dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengusung visi “ Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi ”, sebagai perwujudan perubahan arah kebijakan dari peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, menjadi "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 - u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);
 - v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
 - w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disamping sebagai dokumen perencanaan program tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pelaksanaan program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan peningkatan kompetensi aparatur yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah juga melihat kondisi lingkungan strategis khususnya dampak Pandemi Covid-19 serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun tujuan Penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dan adanya pandemi Covid-19 dalam pencapaian target yang optimal serta perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing serta sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara renstra dengan renja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 mengacu ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sasaran strategis tersebut antara lain :

- A. Tujuan : Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan
Sasaran :
- 1) Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN
 - 2) Meningkatnya kompetensi ASN
- B. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
Sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada Misi ke-2 : 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperkuat sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota”.

Untuk mewujudkan visi tersebut pada Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat, dengan 2 Program dan 11 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPSDMD dan Pencapaian BPSDMD Bappeda s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Urusan Kepegawaian dan Diklat						
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100,00
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	15	6	3	3	100,00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	21	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5094	929	88	88	100,00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	20	5	4	4	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	5	0	0	0	0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	3	0	0	0	0
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	838	180	35	47	134,29
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	1310	262	0	0	0
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100,00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	50	20	10	10	100,00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	105	42	21	21	100,00
	Pengembangan Kompetensi ASN						
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100	100	100	100	100,00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	2030	575	400	478	119,50
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	1829	551	445	512	115,06
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	2941	1519	1.050	1.351	128,67
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional	1200	207	510	349	68,43
	Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2056	490	240	240	100,00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	935	185	302	317	104,97
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100	100	100	99,97	99,97
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	960	244	120	135	112,50
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	1360	402	120	135	112,50
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	600	164	119	119	100,00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	480	160	160	973	608,13
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda	1090	1770	280	1.619	578,21
		Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100	100	100	99,96	99,96
	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	11082	8735	3.240	3.240	100,00
	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi						
		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	80	81,13	78	82	105,13
	Perencanaan Pengembangan Kompetensi						
		Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/ disempurnakan	5	3	1	1	100,00
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	180	72	36	36	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	235	55	52	118	226,92
		Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	29	60	7	10	142,86
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3,5	3,5	3,50	3,32	94,86
	Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi						
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	300	89	57	57	100,00
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	5	2	1	1	100,00
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi	5	3	2	2	100,00
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/ Disempurnakan	10	4	1	2	200,00
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	910	215	88	269	305,68
	Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	80	74,16	90	93,17	103,52
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi						
		Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	19	3	4	4	100,00
		Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	10	6	2	2	100,00
	Kegiatan Uji Kompetensi						
		Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	900	370	150	293	195,33

Ket : Sesuai dengan Kepmendagri 50 Tahun 2020 pada Urusan Penunjang/Eks BAU terdapat Perubahan Nama Kegiatan sehingga tidak dapat disandingkan dengan Capaian Renstra 2018-2023

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
	Urusan Kepegawaian dan Diklat					
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100,00
	Administrasi Keuangan					
	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	15	6	12	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Administrasi Umum					
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	12	12	100,00
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman					
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	12	12	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					
	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5094	929	233	100,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					
	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	20	5	1	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	5	0	0	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	3	0	0	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor					
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	838	180	21	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal					
	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	1310	262	0	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100			
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	50	10	10	100
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	105	21	21	100
	Pengembangan Kompetensi ASN					
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100			
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	2030	350	1.403	69,11
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	1829	320	1.383	75,62
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	2941	430	3.300	112,21
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	100			
	Kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional	1200	170	726	60,5
	Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2056	140	870	42,32
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	935	595	1.097	117,33
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100			
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	960	120	499	51,98
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	1360	120	657	48,31
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	600	120	403	67,17
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	480	40	1.173	244,38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda	1090	280	3.669	336,61
		Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100			
	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	11082	2920	14.897	134,43
	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi					
		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	80			
	Perencanaan Pengembangan Kompetensi					
		Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	5	1	5	100
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	180	36	144	80
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	235	47	220	93,62
		Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	29	4	74	255,17
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3,5			
	Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi					
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	300	60	206	68,67
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	5	1	4	80
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi	5	1	6	120
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	10	2	8	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensa (%)
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	910	182	665	73,08
	Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	80			
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi					
		Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	19	4	11	57,89
		Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	10	2	10	100
	Kegiatan Uji Kompetensi					
		Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	900	237	900	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menjalankan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat, sebagaimana diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Kepegawaian dan Diklat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 1 program utama yang menjadi bagian dari program-program prioritas pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam upayanya bahwa meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah merupakan tugas tanggung jawab bersama maka CorpU menjadi pilihan. Perumusan CorpU di Provinsi Jawa Tengah yang disepakati disebut sebagai Jateng Corporate University atau disingkat JATENG CU. Pengertian JATENG CU yaitu Model dan strategi pengembangan kompetensi secara terintegrasi selaras dengan kebutuhan organisasi. Pemahaman tersebut mengandung maksud bahwa untuk mengembangkan kompetensi inti semua ASN di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara gayeng dengan mengintegrasikan serta melibatkan kementerian, lembaga, instansi, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra utama pengembangan kompetensi.

Model dan strategi yang diwadahi dalam JATENG CU ini diharapkan dapat menjadi panduan *step by step* bagi semua instansi utamanya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam mengidentifikasi kompetensi inti, merencanakan, melaksanakan pengembangan kompetensi dan mengevaluasinya. Dalam setiap proses tersebut pemanfaatan akan lebih di prioritaskan untuk membangun program pengembangan kompetensi yang berbasis teknologi informasi yang terkini.

Model dan strategi yang diwadahi dalam JATENG CU ini diharapkan dapat menjadi panduan *step by step* bagi semua instansi utamanya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam mengidentifikasi kompetensi inti, merencanakan, melaksanakan pengembangan kompetensi dan mengevaluasinya. Dalam setiap proses tersebut pemanfaatan akan lebih di prioritaskan untuk membangun program pengembangan kompetensi yang berbasis teknologi informasi yang terkini.

Adapun Capaian masing-masing indikator program-program prioritas sebagaimana penjelasan berikut :

- Persentase kelulusan Program pengembangan kompetensi ASN, Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar CPNS mencapai 100%.
- Prosentase Kelulusan Sertifikasi Kompetensi 74,16%.
- Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti untuk Renja 2020 sebesar 81,13% dan Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan sebesar 3,5%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti			78	79	80	82	81,1	80		
2	Indeks penjaminan Mutu pelaksanaan pelatihan			3,5	3,5	3,5	93,17	3,5	3,5		
3	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS			100	100	100	99,96	100	100		
4	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis			100	100	100	100	100	100		
5	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Fungsional			100	100	100	100	100	100		
6	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial			100	100	100	99,97	100	100		
7	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi yang lulus uji kompetensi			80	80	80	93,17	74,2	80		Perubahan Target dikarenakan Kelulusan berdasarkan kemampuan personal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100		
2	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	100	100		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dengan kedudukan dan fungsinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka urusan yang diampu menjadi prioritas adalah tentang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dimana dalam pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pedoman dalam pelaksanaan program kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan dengan kebijakan baru dan adanya pandemi Covid-19 dalam perumusan kembali arah kebijakan, strategi dengan program pembangunan dalam Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk menyamakan persepsi dan prioritas pengembangan kompetensi melalui Analisa Kebutuhan Pelatihan yang menjangkau sampai dengan Kabupaten/Kota serta Sinkronisasi Program sebelum menetapkan jenis-jenis pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dihadapi diantaranya :

- 1) Perencanaan pengembangan kompetensi PNS belum mengacu kebutuhan organisasi;
- 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi serta rendahnya rata - rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi;
- 3) Belum optimal penjaminan mutu pelatihan;
- 4) Menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi;
- 5) Perencanaan pengembangan kompetensi PNS sepenuhnya berdasarkan AKPK;
- 6) Peralihan metode yang semula klasikal menjadi metode distance learning, karena memerlukan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran *e-learning*.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada berikut berikut ini :

Tabel 2.4

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (.000)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				68.662.224.000	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				68.662.224.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang			457.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang			457.000.000
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	171.763.000				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	171.763.000
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dokumen	285.237.000				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dokumen	285.237.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang			40.755.449.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang			40.755.449.000
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	32.604.584.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	32.604.584.000
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	7.728.850.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	7.728.850.000
			Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 dokumen	65.000.000				Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 dokumen	65.000.000
			Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	66.440.000				Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	66.440.000
			Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	1 dokumen	69.575.000				Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang	1 dokumen	69.575.000
			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	221.000.000				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	221.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semarang			200.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Semarang			200.000
			Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan	200.000				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan	200.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semarang			125.000	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Semarang			125.000
			Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	1 dokumen	125.000				Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	1 dokumen	125.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang			1.097.313.000	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Semarang			1.097.313.000
			Jumlah Unit Pakaian Dinas yang diadakan	275 unit	151.250.000				Jumlah Unit Pakaian Dinas yang diadakan	275 unit	151.250.000

			Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	84.000.000				Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	84.000.000
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	90 orang	862.063.000				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	90 orang	862.063.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang			6.171.641.000	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang			6.171.641.000
			Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	420.318.000				Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	420.318.000
			Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	161 unit	1.157.500.000				Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	161 unit	1.157.500.000
			Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	7164 unit	208.137.000				Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	7164 unit	208.137.000
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat	12 bulan	735.875.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat	12 bulan	735.875.000
			Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	12 bulan	701.809.000				Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	12 bulan	701.809.000
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	172.233.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	172.233.000
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	102.926.000				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	102.926.000
			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	322.102.000				Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan	12 bulan	322.102.000
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	12 bulan	1.066.250.000				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	12 bulan	1.066.250.000
			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 bulan	80.644.000				Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 bulan	80.644.000
			Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 dokumen	1.203.847.000				Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 dokumen	1.203.847.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang			2.051.672.000	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang			2.051.672.000
			Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	157 unit	1.390.900.000				Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	157 unit	1.390.900.000
			Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	1 unit	21.772.000				Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	1 unit	21.772.000
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	21 unit	639.000.000				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	21 unit	639.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			10.745.267.000	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			10.745.267.000
			Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 bulan	17.500.000				Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 bulan	17.500.000
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat	12 bulan	2.627.767.000				Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat	12 bulan	2.627.767.000
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	8.100.000.000				Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	8.100.000.000

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang			7.058.882.000	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semarang			7.058.882.000
			Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan	227.882.000				Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan	227.882.000
			Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	12 bulan	25.000.000				Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	12 bulan	25.000.000
			Jumlah unit gedung yang direhab	50 unit	5.100.000.000				Jumlah unit gedung yang direhab	50 unit	5.100.000.000
			Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	12 bulan	1.706.000.000				Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	12 bulan	1.706.000.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				20.204.19.000	II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				20.204.19.000
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang			3.343.592.000	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Semarang			3.343.592.000
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	38.000.000				Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	38.000.000
			Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun / disempurnakan	1 dokumen	6.500.000				Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun / disempurnakan	1 dokumen	6.500.000
			Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	25 jenis	150.000.000				Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	25 jenis	150.000.000
			Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	7.814.000				Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	7.814.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1080 orang	595.600.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1080 orang	595.600.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	660 orang	1.072.560.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	660 orang	1.072.560.000
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	470 orang	1.433.970.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	470 orang	1.433.970.000
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	12 dokumen	8.409.000				Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	12 dokumen	8.409.000
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	22 angkatan	30.739.000				Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	22 angkatan	30.739.000
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semarang			16.860.597.000	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semarang			16.860.597.000
			Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun / disempurnakan	1 dokumen	35.539.000				Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun / disempurnakan	1 dokumen	35.539.000
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	75.500.000				Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	75.500.000
			Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	3 orang	43.000.000				Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	3 orang	43.000.000

			Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	2 jenis	7.000.000				Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	2 jenis	7.000.000	
			Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 orang	632.000.000				Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 orang	632.000.000	
			Jumlah pelatihan yang diakreditasi	1 jenis	55.439.000				Jumlah pelatihan yang diakreditasi	1 jenis	55.439.000	
			Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 orang	60.000.000				Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	4 orang	60.000.000	
			Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen	84.419.000				Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen	84.419.000	
			Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	5 jenis	36.000.000				Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	5 jenis	36.000.000	
			Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	6.736.000				Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 dokumen	6.736.000	
			Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	320 orang	1.026.960.000				Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	320 orang	1.026.960.000	
			Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	330 orang	1.374.180.000				Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	330 orang	1.374.180.000	
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	425 orang	1.294.860.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	425 orang	1.294.860.000	
			Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	1360 orang	5.290.900.000				Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	1360 orang	5.290.900.000	
			Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah	350 orang	412.500.000				Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah	350 orang	412.500.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	120 orang	1.642.010.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	120 orang	1.642.010.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	120 orang	1.924.850.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	120 orang	1.924.850.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	120 orang	2.566.500.000				Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	120 orang	2.566.500.000	
			Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	40 orang	89.760.000				Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	40 orang	89.760.000	
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	15 dokumen	69.339.000				Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	15 dokumen	69.339.000	
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	100 angkatan	133.105.000				Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	100 angkatan	133.105.000	
TOTAL					88.866.413.000		TOTAL					88.866.413.000

Dalam Tabel 2.4 diatas dapat digambarkan bahwa kebutuhan yang diajukan dalam Renja 2023 sebesar Rp. 88.866.413.000,- digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara *e-learning/blended learning* sehingga membutuhkan penguatan dalam sarana dan prasarana penunjang pelatihan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

Birokrasi harus memiliki visi yang besar, bersifat jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan permasalahan pembangunan dimana merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, beberapa identifikasi permasalahan / tantangan yang muncul di BPSDMD antara lain :

- Belum menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi.
- Perencanaan pengembangan kompetensi PNS belum sepenuhnya berdasarkan AKPK
- Kurangnya dukungan perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi

Guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 –2025 “ **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR** ” dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa strategi menjawab tantangan, antara lain :

- Optimalisasi hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai dasar perencanaan pengembangan kapasitas ASN
- Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran Modern
- Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam berbagai model / jenis pelatihan
- Pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang konsisten dan Berkesinambungan
- Peningkatan manajemen SDM pengembang kompetensi guna mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellence public services) serta mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing global
- Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana sesuai master plan dalam rangka menjamin mutu pelayanan publik serta mewujudkan lembaga pelatihan yang kompetitif
- Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pengembangan sistem AKPK dan perlunya standart kompetensi sebagai dasar analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.

Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik :

a. Berakhlak mulia ;

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai - nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

b. Berkesadaran Hukum ;

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

c. Cinta Tanah Air ;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

d. Berwawasan Global ;

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke - 3, RPJMN ke - 4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pelayanan publik yang prima di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur birokrasi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi belum menunjukkan arah reformasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan demikian visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional & berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Proses perencanaan kegiatan yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) sebagai berikut :

a. Strength ;

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai problem solving dalam pembangunan memiliki reputasi yang baik dalam pengembangan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan ;

- Tersertifikasi ISO 9001:2015, bukti terhadap pemeliharaan standar mutu pelayanan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, dimana pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Predikat Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik dalam kategori Lembaga Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS (4 kali sebagai terbaik pertama).
- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi berbasis corporate university seperti yang diterapkan di era sekarang sebagai salah satu bentuk upaya dan inovasi pelatihan dalam kondisi pandemi Covid-19.
- Hasil SAKIP Tahun 2021 sebesar 80,64 kategori A, hal ini menjadi indikator BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu pada Tahun 2023, nilai SAKIP BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ditarget minimal 78,00 atau lebih tinggi dari

target Renstra Tahun 2018-2023.

b. Weakness ;

Kurangnya pemanfaatan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai faktor rendahnya rata-rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi ; rendahnya rata-rata pegawai terkait dengan pengiriman peserta pelatihan oleh stakeholders yang seringkali mengirimkan peserta yang sama untuk beberapa pelatihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis perangkat daerah.

c. Opportunity ;

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mendukung melakukan pembenahan secara besar besaran menjadikan Jateng Corporate University dengan proses yang terintegrasi, metode pembelajaran yang menarik, output dan outcome jelas dalam menyiapkan ASN yang mempunyai integritas, mampu melayani masyarakat secara mudah, murah, dan cepat.
- Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi Jawa Tengah yang telah dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh jabatan fungsional.

d. Threat ;

- Penyelenggaran bangkom aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan rendahnya rata - rata pegawai mendapatkan bangkom, sehingga tidak adanya kesesuaian perencanaan pengembangan kompetensi dengan perencanaan penganggaran dari tiap stakeholders.
- Kurang optimalnya penjaminan mutu dalam pelatihan, karena seluruh program pelatihan teknis dan fungsional belum terakreditasi hingga dalam evaluasi pasca diklat belum dilakukan sampai kepada evaluasi dampak yang mendalam.
- Pergeseran dan shift paradigma dari training ke learning yang bisa menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi dalam beberapa kurikulum dan modul yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Sesuai dengan Dokumen Perubahan Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan memperhatikan hasil dari analisis SWOT di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah “**Mewujudkan ASN yang kompeten memiliki daya juang, inovatif dan profesional**” dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut dengan persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
- Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2022 target tujuan yang ingin dicapai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar yaitu **89 %**. Target sasaran tersebut dapat dicapai melalui target masing-masing tujuan :

- 1) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah **94 %**;
- 2) Persentase ASN yang tersertifikasi sebesar **90 %**.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Sat	2023
1	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	99.29
		1. Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN ditingkatkan kompetensinya	%	30
		2. Meningkatnya penjaminan kompetensi	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35.08
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	81
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai	81.5
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	78.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPSDMD, maka harus direncanakan program maupun kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Pada Tahun 2023 direncanakan 1 (satu) program prioritas dengan 2 (dua) kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional.

Program dan kegiatan prioritas tersebut didukung oleh program dan kegiatan pendukung (ex-BAU) berupa 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan prioritas maupun pendukung tersebut dalam rangka pencapaian tujuan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, guna mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional.

Kesepakatan Forum PD untuk Penyempurnaan Dokumen Renja Tahun 2023 telah diakomodir dalam program, kegiatan, sub kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengajar/WI memegang peran penting dalam peningkatan Kualitas Kelulusan dan Kemampuan Peserta.
2. Kemiskinan -> Angka Pengangguran menjadi titik pangkal di salah satu Visi Misi Gubernur bagaimana untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tugas BPSDMD sebagai unsur penunjang untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan Meningkatkan Kompetensi ASN.
3. Karakter penting dalam pengembangan kompetensi ASN, diselipkan pendidikan karakter dalam bangkom sebagai Kapasitas Diklat.
4. Menyusun kebijakan teknis dengan kolaborasi dengan OPD di Jateng terkait usulan kebutuhan pengembangan Kompetensi.
5. BPSDMD agar memperhatikan dan bertanggungjawab dalam mengawal Kebijakan Jateng Corpu.

Adapun Penentuan Program Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan di Tabel 4.1 :

TABEL 4.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X.XX					49.777.912.000	75.630.465.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			49.562.010.000	75.630.465.000
X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		457.000.000	457.000.000
X.XX.01.1.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	177.639.000	171.763.000
X.XX.01.1.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.361.000	285.237.000
X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.928.295.000	45.343.865.000
X.XX.01.1.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.519.271.000	37.193.000.000
X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.068.718.000	7.728.850.000
X.XX.01.1.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.876.000	65.000.000
X.XX.01.1.02.04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.699.000	66.440.000
X.XX.01.1.02.06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	73.100.000	69.575.000
X.XX.01.1.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	125.631.000	221.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		200.000.000	220.000.000
X.XX.01.1.03.02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	220.000.000
X.XX.01.1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		118.174.000	125.000.000
X.XX.01.1.04.07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	118.174.000	125.000.000
X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		416.925.000	1.193.650.000
X.XX.01.1.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	151.250.000
X.XX.01.1.05.03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.100.000	92.400.000
X.XX.01.1.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	368.825.000	950.000.000
X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.899.844.000	5.794.350.000
X.XX.01.1.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145.077.000	462.350.000
X.XX.01.1.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.117.710.000	530.000.000
X.XX.01.1.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	374.165.000	810.000.000
X.XX.01.1.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.850.000	772.000.000
X.XX.01.1.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.938.000	190.000.000
X.XX.01.1.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.000.000	114.000.000
X.XX.01.1.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					70.500.000	355.000.000
X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.220.000	1.173.000.000
X.XX.01.1.06.10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	88.000.000
X.XX.01.1.06.11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	579.879.000	1.300.000.000
X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.192.900.000	2.525.000.000
X.XX.01.1.07.05				Pengadaan Mebel	-	-
X.XX.01.1.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	804.400.000	1.500.000.000
X.XX.01.1.07.07				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000	25.000.000
X.XX.01.1.07.08				Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-
X.XX.01.1.07.09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
X.XX.01.1.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	373.500.000	1.000.000.000
X.XX.01.1.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.676.800.000	11.817.500.000
X.XX.01.1.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	17.500.000
X.XX.01.1.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.143.000.000	2.800.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X.XX.01.1.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.529.300.000	9.000.000.000
X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.672.072.000	8.154.100.000
X.XX.01.1.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.600.000	250.000.000
X.XX.01.1.09.07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	27.500.000
X.XX.01.1.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.612.220.000	6.000.000.000
X.XX.01.1.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	884.252.000	1.876.600.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				24.552.711.000	20.615.260.000
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			24.768.613.000	20.615.260.000
5.04.02.1.01			Pengembangan Kompetensi Teknis		3.343.592.000	3.446.158.000
5.04.02.1.01.01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	44.500.000	44.500.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.04.02.1.01.02				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	157.814.000	158.595.000
5.04.02.1.01.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3.102.130.000	3.200.000.000
5.04.02.1.01.04				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	39.148.000	43.063.000
5.04.02.1.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		21.425.021.000	17.169.102.000
5.04.02.1.02.01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	89.389.000	111.039.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD (Rp)	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.04.02.1.02.02				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	50.000.000	55.800.000
5.04.02.1.02.03				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	632.000.000	700.000.000
5.04.02.1.02.04				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	250.508.000	228.844.000
5.04.02.1.02.06				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	42.736.000	43.410.000
5.04.02.1.02.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20.157.944.000	15.807.320.000
5.04.02.1.02.08				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	202.444.000	222.689.000
TOTAL					74.330.623.000	96.245.725.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025. Kondisi Lingkungan Strategis (Lingstra) dampak dari Pandemi *Covid 19* mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia (dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya) yang berimbas pada penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang optimal sesuai dengan regulasi, transparan, serta konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati.

Oleh karena itu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk melakukan perubahan pola penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pola klasikal menjadi pola *virtual learning* atau jarak jauh yang berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam percepatan transformasi ASN, dengan didukung Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi yang berperan sebagai penguatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang mengikuti pelatihan.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, dimana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai *problem solving* bagi permasalahan pembangunan SDM ASN di Jawa Tengah melibatkan beberapa *stakeholder* / pentahelik dalam *Community of Practice*.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN, guna mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional memberikan pelayanan *excellent* kepada masyarakat melalui Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi, melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi melalui Jateng Corporate University menuju Jateng Pinter Bareng, penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan Techno Training Center serta memberikan fasilitasi kepada *stakeholders* terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001